



# RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

## LOREM IPSUM



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Jl. Lintas Gunungtua – Padangsidempuan Km.11  
Email: [disketapangpaluta@gmail.com](mailto:disketapangpaluta@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat nikmatnya serta karuniaNya Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dapat disusun. Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 ini sebagai acuan dan alat monitor sekaligus sebagai upaya untuk menyahuti kebutuhan-kebutuhan operasional kantor maupun usulan ataupun tanggapan dari masyarakat guna untuk mendukung kemajuan bersama.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini disusun dengan mempedomani rencana pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dengan tujuan :

1. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan visi, misi Bupati Padang Lawas Utara;
2. Pelaksanaan rencana kerja dinas ketahanan pangan tahun anggaran 2024;
3. Pedoman umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan ini belum sempurna sebagaimana harapan semua pihak, oleh sebab itu saran dan kritik diharapkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Gunungtua, 15 Agustus 2024  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



**ROMI HENRAJA RITONGA, S.Sos.MM**  
Pembina Tk. I/ IV.b  
NIP. 197501042003121002



## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan....	6
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan.....	15
1.3 Program dan Kegiatan.....	17
BAB V PENUTUP.....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (P-Renja) merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun sebagai amanat atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Ketahanan Pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Pembangunan Jangka menengah Propinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa agenda renja perubahan dimaknai sebagai pertimbangan atas hasil evaluasi dan monitoring perangkat daerah terhadap rencana yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan yang berusaha untuk mewujudkan ketidaksesuaian yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan perkembangan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau;
- b. Adanya masukan dan laporan serta pertimbangan teknis terhadap sasaran, lokasi, jenis kegiatan yang memang membutuhkan perhatian dan penanganan anggaran agar dapat membantu masyarakat yang dimaksud;

- c. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan dan menetapkan program dan kegiatan tertentu harus dilaksanakan di tengah masyarakat.

Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup serta resiko bencana serta akan berfokus pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 yang memuat prioritas program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru; serta memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan rancangan awal renja perangkat daerah untuk mekanisme perencanaan pembangunan daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan beberapa tahapan dalam rangka penyusunan ranwal renja meliputi : 1) penggalian masalah dan potensi ; 2) pembahasan lingkup dinas ketahanan pangan; 3) Pembahasan bersama stake holder; 4) Verifikasi awal oleh bappeda; 5) Forum Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/K.R.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT ( Pangan Segar Asal Tumbuhan).

15. Peraturan daerah kabupaten padang lawas utara nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan perangkat daerah;
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang uraian tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah kabupaten padang lawas utara.
17. Peraturan daerah kabupaten padang lawas utara nomor 3 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten padang lawas utara tahun 2015-2035;
18. Peraturan daerah kabupaten padang lawas utara nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
20. Peraturan Bupati padang lawas utara nomor 47 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati padang lawas utara nomor 34 tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tata kerja dan uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah kabupaten padang lawas utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

1. Menjabarkan rencana pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ke dalam rencana operasional tahun 2024;
2. Menjaga konsistensi capaian target kinerja program/kegiatan dan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
3. Instrumen bagi Pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pangan;
4. Menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2024.

#### **B. Tujuan**

1. Memberikan landasan operasional dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024;
3. Mewujudkan konsistensi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan kabupaten padang lawas utara tahun 2024 dengan dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten padang lawas utara tahun 2024-2026 dan hasil musrenbang RKPD.

4. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perangkat daerah;
6. Menjaga konsistensi capaian kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah kabupaten padang lawas utara.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.5 Latar Belakang.....	1
1.6 Landasan Hukum.....	2
1.7 Maksud dan Tujuan.....	4
1.8 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan....	6
<b>BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan.....	15
3.3 Program dan Kegiatan.....	17
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>22</b>

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan sampai Triwulan II**

Pelaksanaan Evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam hal pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efisiensi, dan efektifitas.

Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat pada matrik analisis berikut :

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2024**  
**Kabupaten Padang Lawas Utara**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come)/ Kegiatan (Out put)	Target Capaian Kinerja RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun (n)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Kinerja Tahun (n-2)	Realisasi Renja Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	BB Predikat						BB Predikat	BB Predikat	0,0%
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran	100%						100%	100%	100%

2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dok							4 dok	4 dok	33,33%
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	3 Laporan							1 Laporan	1 Laporan	33,33%
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan							1 Laporan	1 Laporan	33,33%
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	100%							100%	100%	100%

2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	52 orang							14 orang	14 orang	33,33%
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	36 dok							12 Dok	12 dok	30,00%
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	3 Laporan							1 Laporan	1 laporan	33,33%
<b>2.09.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dukungan administrasi bmd</b>	100%							100%	100%	100%
2.09.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah skpd	3 Dok							0 Dok	0 Dok	0%
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	3 Dok							0 Lap	0 Lap	0%



2.09.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 paket							1 paket	1 paket	33,33%
2.09.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket							2 paket	2 paket	30,00%
2.09.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket							1 paket	1 paket	33,33%
2.09.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket							2 paket	2 paket	30,00%
2.09.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket							2 paket	2 paket	30,00%
2.09.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30 dok							10 dok	10 dok	30,00%

2.09.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	3 paket							1 paket	1 paket	33,33%
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	150 lap							100 lap	400 lap	80%
<b>2.09.01.2.07</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dukungan bmd</b>	100%							100%	100%	100%
2.09.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit							0 unit	0 unit	0,00%
2.09.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit							0 unit	0 unit	0%
2.09.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 unit							1 unit	1 unit	20%

2.09.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit							1 unit	1 unit	20%
2.09.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit							0 unit	0 unit	0%
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dukungan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100%							100%	100%	100%
2.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36 Lap							12 lap	12 lap	30,00%
2.09.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Lap							12 Lap	12 lap	30,0%

2.09.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Lap							12 Lap	12 lap	30,0%
<b>2.09.01.2.09</b>	<b><i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i></b>	<b><i>Persentase pemenuhan pemeliharaan penunjang urusan pemerintah daerah</i></b>	100%							100%	100%	100%
2.09.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 unit							4 unit	4 unit	30,0%
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit							0 unit	0 unit	0%
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit							0 unit	0 unit	0%

2.09.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Persentase ketersediaan pangan	100%							100%	100%	100%
2.09.02.2.01	<i>Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung keandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan</i>	100%							100%	100%	100%
2.09.02.2.01.01	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	5 unit							0 unit	0 unit	0,0%
2.09.02.2.01.02	Penyediaan infrastruktur lantai jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	5 unit							0 unit	0 unit	0,0%
2.09.02.2.01.03	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	36 ton							3 ton	4 ton	11,11%

2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	3 Laporan							1 Laporan	1 laporan	33,33%
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Skor PPH (Pola Pangan Harapan)</b>	100%							100%	100%	100%
<b>2.09.03.2.01</b>	<b><i>Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan</i></b>	<b><i>Persentase pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan</i></b>	100%							100%	100%	100%
2.09.03.2.01.01	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	3 Laporan							1 Laporan	1 laporan	33,33%
2.09.03.2.01.02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	3 Laporan							1 Laporan	1 laporan	33,33%

2.09.03.2.01.06	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan	3 Unit							0 unit	0 unit	0%
<b>2.09.03.2.02</b>	<b><i>Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota</i></b>	<b><i>Persentase CPPD (cadangan pangan pemerintah daerah)</i></b>	100%							100%	100%	100%
2.09.03.2.02.02	Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	3 Laporan							0 Lap	0 Lap	0%
2.09.03.2.02.03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	30 ton							3 ton	4 ton	13,33%
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang terpelihara	3 ton							0 ton	0 ton	0%

<b>2.09.03.2.04</b>	<b><i>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i></b>	<b><i>Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun</i></b>	100%							100%	100%	100%
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Laporan							1 Laporan	1 laporan	33,33%
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	3 Laporan							1 Laporan	1 laporan	33,33%
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b><i>Persentase penurunan angka kemiskinan</i></b>	100%							100%	100%	100%
<b>2.09.04.2.01</b>	<b><i>Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan</i></b>	<b><i>Dokumen peta FSVA</i></b>	100%							100%	100%	100%



2.09.05.2.01	<i>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase pengawasan keamanan pangan segar</i>	100%							100%	100%	100%
2.09.05.2.01.05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Laporan							1 Laporan	1 laporan	33,33%

## **BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

#### **1. Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada P-RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang kualifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan.

#### **2. Sasaran**

Indikator tujuan yaitu skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi. Hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai Sasaran Dinas Ketahanan Pangan yaitu Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas dengan indikator sasaran PPH ketersediaan, Angka Kecukupan Gizi (Angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein).

- a. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang seimbang baik kebutuhan kalori dan kebutuhan protein bagi kebutuhan hidup masyarakat;
- b. Pendistribusian bahan pangan yang lancar;
- c. Kualitas pangan yang aman dikonsumsi;
- d. Mengurangi jumlah desa stunting sesuai penetapan daerah propinsi maupun kabupaten/kota;
- e. Mengatasi dan mengurangi dampak rawan pangan di daerah kabupaten/kota;
- f. Peningkatan pembinaan desa binaan PKK dan menggalakkan kegiatan PW2KSS yang dibebankan bagi Kelompok Wanita Tani.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan**  
**Kabupaten Padang Lawas Utara**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
				2024	2025	2026	
1	Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan produksi pangan utama masyarakat	1. Cadangan pangan/ ketersediaan pangan utama	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kecukupan energi dan keberagaman pangan masyarakat	2. Skor pola pangan harapan (PPH), Ketersediaan energi dan Ketersediaan protein	2. 90%	2. 90%	2. 90%	
			3. Daerah rentan rawan pangan	2. 2.400 kkal/ kapita /hari 63 gr/ kapita / hari	2. 2.400 kkal/ kapita /hari 63 gr/ kapita / hari	2. 2.400 kkal/ kapita /hari 63 gr/ kapita / hari	
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang di uji	3. 14%	3. 14%	3. 14%	80%	80%	80%

### 3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Di dalam tujuan dan sasaran nasional yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diselaraskan dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
			Meningkatnya derajatnya kesehatan		
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		
			Meningkatnya iklim demokrasi		
			Peningkatan ketangguhan bencana		
			Menurunnya angka kemiskinan		
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani		
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata		
3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu	Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
	Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera				
			Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman		
			Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan		
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
			Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah		
4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
6	Terpenuhinya layanan dasar			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
9	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam keidupan masyarakat			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa			Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
15	Meningkatnya budaya literasi untuk			Mewujudkan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas SDM

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
	mewujudkan masyarakat berpengetahuan, innovative dan kreatif			Manusia yang Berkualitas	yang Berdaya Saing
16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
17	Meningkatnya konektivitas wilayah			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur dasar
18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan				
19	Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien				
20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan eonomi			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
				Berwawasan Lingkungan	
23	Pembangunan rendah karbon			Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
24	Meguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
			Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima		
			Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur		
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah		

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu		Bertambah / Berkurang
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	KETAHANAN PANGAN									
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	B Predikat	B Predikat			
	2.09.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penunjang urusan peemrintahan daerah	Persentase penunjang urusan peemrintahan daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%	2.062.800	2.062.800	
	2.09.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	<i>Persentase peemuhan dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran</i>	<i>Persentase peemuhan dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	6 Dokumen	6 Dokumen	2.062.800	2.062.800	0,00

	2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan lapoaran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 Laporan	2 Laporan	0,0	0,0	0,00
	2.09.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	0,0	0,0	0,00
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			
	2.09.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	<i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	144 orang/bulan	144 orang/bulan	1.376.903.522	1.376.903.522	0,00

	2.09.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 dokumen	12 dokumen	0,00	0,00	0,00
	2.09.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	4.897.000	4.897.000	0,00
	2.09.01.2.03	Administrasi barang milik daerah	<i>persentase pemenuhan dukungan administrasi bmd</i>	<i>persentase pemenuhan dukungan administrasi bmd</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			
	2.09.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah skpd	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah skpd	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 dokumen	1 dokumen	0,0	0,0	0,00
	2.09.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 laporan	1 laporan	0,0	0,0	0,00

	2.09.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	<i>persentase pemenuhan dukungan administrasi kepegawaian</i>	<i>persentase pemenuhan dukungan administrasi kepegawaian</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			
	2.09.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	18 paket	18 paket	0,0	0,0	0,00
	2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 orang	1 orang	0,0	0,0	0,00
	2.09.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 orang	1 orang	5.000.000	0,0	(5.000.000)

2.09.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	<i>persentase dukungan pemenuhan administrasi umum</i>	<i>persentase dukungan pemenuhan administrasi umum</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%				
2.09.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pengerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pengerangan bangunan kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 paket	2 paket	1.968.500	1.968.500		0,00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 paket	2 paket	4.998.000	8.364.700		3.366.700
2.09.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 paket	1 paket	3.999.900	2.041.200		(1.958.700)
2.09.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 paket	2 paket	5.024.800	4.638.400		(386.400)

	2.09.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 paket	2 paket	4.999.400	4.999.400	0,00
	2.09.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 paket	2 paket	9.999.500	11.279.500	1.280.000
	2.09.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 paket	2 paket	4.170.100	0,00	(4.170.100)
	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100 laporan	100 laporan	67.414.000	76.570.000	9.156.000
	2.09.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	<i>persentase pemenuhan dukungan bmd</i>	<i>persentase pemenuhan dukungan bmd</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			

	2.09.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 unit	1 unit	0,00	0,00	0,00
	2.09.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 unit	1 unit	0,00	0,00	0,00
	2.09.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 unit	1 unit	0,00	0,00	0,00
	2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 unit	1 unit	941.000	941.000	0,00
	2.09.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 unit	2 unit	0,00	0,00	0,00

	2.09.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<i>persentase pemenuhan dukungan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>persentase pemenuhan dukungan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			
	2.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 laporan	12 laporan	3.060.000	3.060.000	0,00
	2.09.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 laporan	12 laporan	29.993.500	29.993.500	0,00
	2.09.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 laporan	12 laporan	213.127.800	213.127.800	0,00

2.09.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	<i>persentase pemenuhan pemeliharaan penunjang urusan peemrintah daerah</i>	<i>persentase pemenuhan pemeliharaan penunjang urusan peemrintah daerah</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	4 unit	4 unit	40.420.000	40.420.000	0,00
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 unit	2 unit	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	3 unit	3 unit	2.977.500	690.000	(1.287.500)
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan pangan	Persentase Ketersediaan pangan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			

	2.09.02.2.01	<i>Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan</i>	<i>Persentase pemenuhan infrastruktur kemandirian pangan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%	0,00	0,00	0,00
	2.09.02.2.01.01	Penyediaan infrasturktur lumbung pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 unit	1 unit	0,00	0,00	0,00
	2.09.02.2.01.02	Penyediaan infrastruktur lantai jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 unit	1 unit	0,00	0,00	0,00
	2.09.02.2.01.03	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 unit	1 unit	0,00	0,00	0,00
	2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	28.500.000	27.100.000	(1.400.000)

2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%				
2.09.03.2.01	<i>Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan</i>	<i>Persentase pemuhan infrastruktur kemandirian pangan</i>	<i>Persentase pemuhan infrastruktur kemandirian pangan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%				
2.09.03.2.01.01	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000	18.000.000		0,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00		0,00
2.09.03.2.01.06	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 unit	1 unit	0,00	0,00		0,00

	2.09.03.2.02	<i>Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota</i>	<i>Persentase pemenuhan CPPD (cadangan pangan pemerintah daerah)</i>	<i>Persentase pemenuhan CPPD (cadangan pangan pemerintah daerah)</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			
	2.09.03.2.02.02	Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0,00
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	4 ton	4 ton	39.246.500	39.246.500	0,00
	2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 ton	1 ton	5.196.200	6.596.200	1.400.000

	2.09.03.2.04	<i>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>	<i>Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita per tahun</i>	<i>Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita per tahun</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	22.481.000	22.481.000	0,00
	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	22.760.000	22.760.000	0,00
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			

	2.09.04.2.01	<i>Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan</i>	<i>Dokumen peta FSVA</i>	<i>Dokumen peta FSVA</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			
	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 dokumen	1 dokumen	26.398.800	26.398.800	0,00
	2.09.04.2.02	<i>Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota</i>	<i>Persentase penanganan kerawanan pangan</i>	<i>Persentase penanganan kerawanan pangan</i>	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			
	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	43.810.000	3.810.000

	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 dokumen	1 dokumen	5.010.000	1.200.000	(3.810.000)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase komoditas yang diawasi	Persentase komoditas yang diawasi	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%			
	2.09.05.2.01	<i>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</i>	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	100%	100%	30.547.600	30.547.600	0,00

	2.09.05.2.01.05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 unit	1 unit	30.547.600	30.547.600	0,00
							JUMLAH		2.020.097.422	2.020.097.422	0,00



#### Bab 4. P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, hasil evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 serta penggalian masalah dan potensi-potensi yang ada dengan mendasarkan pada metode pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, stake holder, akademisi dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun dengan menyesuaikan adanya dinamika sosial dan ekonomi maupun akibat politik sehingga kegiatan yang dilaksanakan diupayakan berpihak pada masyarakat yang lemah.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pengimplementasian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Dengan Rencana Kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan daerah agar lebih merata.

Gunungtua, 15 Agustus 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



ROMI HENRAJA RITONGA, S.Sos.MM  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 197501042003121002